

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(Studi Pada Pelayanan Dasar Di Kabupaten Pesisir Barat)

(Tesis)

Oleh

LUSITA ANJELINA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(Studi Pada Pelayanan Dasar Di Kabupaten Pesisir Barat)

**Oleh
LUSITA ANJELINA**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (Studi Pada Pelayanan Dasar Di Kabupaten Pesisir Barat)

Oleh

Lusita Anjelina

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi pada kenyataannya masih terdapat daerah tertinggal karena masih mengalami ketimpangan pembangunan pada pelayanan dasar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, untuk mengetahui dan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dan untuk mengetahui dan menganalisis permodelan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan jumlah informan sebanyak 11 informan. Teknik analisis data menggunakan daftar pertanyaan/kuisisioner, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat pada aspek pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan aspek peningkatan pembangunan sosial ekonomi meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengendalian), dari ketiga aspek tersebut terdapat aspek yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu aspek pelayanan pendidikan hal ini terlihat dari sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, akses jalan menuju lembaga pendidikan yang kurang memadai serta perlu adanya penambahan jumlah guru di daerah terpencil dan peningkatan kompetensi guru. Skala prioritas dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat adalah aspek pembangunan sosial ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Aspek pembangunan sosial ekonomi memiliki bobot skor sebesar 0.705 atau 70.5%, diikuti oleh aspek pelayanan kesehatan sebesar 0.211 atau 21.1% serta aspek pelayanan pendidikan sebesar 0.084 atau 8.4%. Permodelan pelaksanaan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat yang tepat adalah pada aspek pelayanan kesehatan, aspek pelayanan kesehatan memiliki persentase sebesar 62.4%, kemudian aspek pembangunan peningkatan sosial ekonomi sebesar 33.6% dan aspek pelayanan pendidikan sebesar 4.0%.

Kata Kunci: Strategi, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pelayanan Dasar

ABSTRACT

STRATEGY TO ACCELERATE DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED AREAS

(Study on Basic Services In West Coast District)

By

Lusita Anjelina

The implementation of regional development is a regional authority carried out by the local government but in reality there are still disadvantaged areas because they still experience development inequality in basic services. The purpose of this study is to find out the strategy of the West Coast Regency Government in regional development in accelerating the improvement of disadvantaged areas, to find out and scale the priority of the West Coast Regency Government in accelerating the improvement of disadvantaged areas and to find out and analyze the model strategy of accelerating the improvement of disadvantaged areas in West Coast Regency. This study used a mixed method with the number of informants of 11 informants. Data analysis techniques use a list of questions/questionnaires, interviews and observations. Data analysis uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results showed that the strategy of implementing the acceleration of development of disadvantaged areas in West Coast Regency in aspects of health services, education services and aspects of improving socio-economic development includes planning, organizing, actuating and controlling, Of the three aspects there are aspects that have not been implemented optimally, namely the aspect of educational services this is seen from inadequate educational facilities and infrastructure, road access to inadequate educational institutions and the need for an increase in the number of teachers in remote areas and increased teacher competence. socio-economic development that can create community welfare, the scale of priority aspects of socio-economic development, namely socio-economic development aspects have a score weight of 0.705 or 70.5%, followed by aspects of health services by 0,211 or 21.1% and aspects of educational services by 0.084 or 8.4%. Modeling the implementation of the strategy of accelerating the improvement of disadvantaged areas in West Coast Regency is the right aspect of health services, aspects of health services have a percentage of 62.4%, then the aspect of improving socio-economic improvement by 33.6% and aspects of education services by 4.0%.

Keywords: Strategy, Development of Disadvantaged Areas, Basic Services

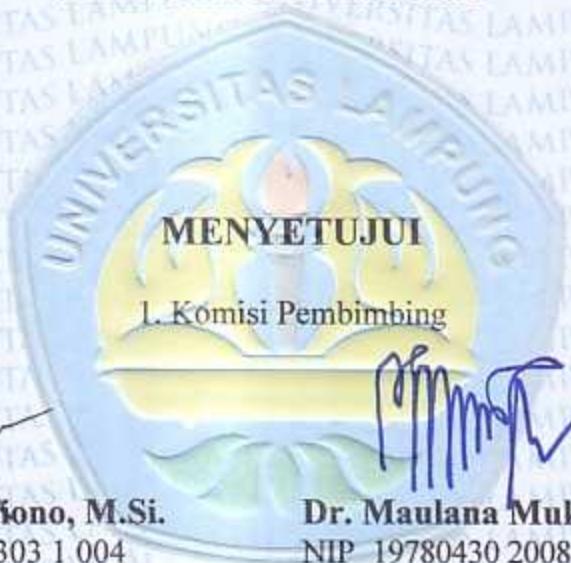
Judul Tesis : **STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**
(Studi pada Pelayanan Dasar di Kabupaten
Pesisir Barat)

Nama Mahasiswa : *Tusita Anjefina*

No. Pokok Mahasiswa : **1826021010**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
NIP 19780430 200812 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

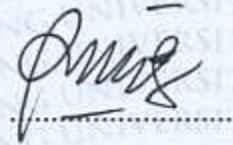
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

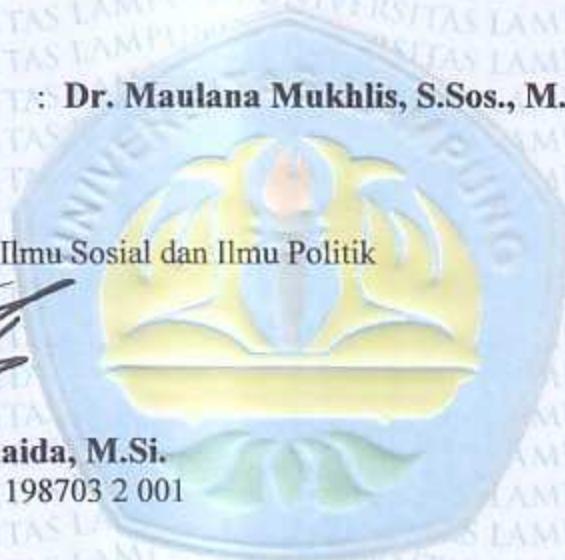
Ketua : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**



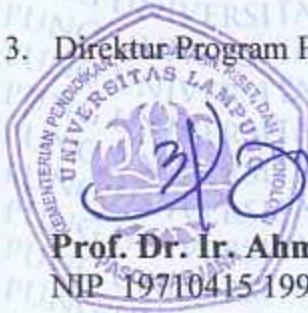
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **08 Maret 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2022

Penulis,



LUSITA ANJELINA

NPM 1826021010

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap **LUSITA ANJELINA**. Lahir di Tanjung Setia pada tanggal 21 Januari 1995 sebagai putri pertama dari pasangan Bapak John Alfian dan Ibu Rita Zahara. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, memiliki seorang adik perempuan bernama Mewa Nirwana dan seorang adik laki-laki bernama Ariel Alfian. Pada tanggal 12 Desember 2020 penulis menikah dengan Edi Pramudya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zhafran Akara Adli.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat di Pesisir Selatan lulus pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Biha lulus pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesisir Selatan lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Selatan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Paralel lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 penulis mengabdikan diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Pesisir Barat di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Pada Tahun 2020 penulis tergabung dalam Bhayangkari Polres Lampung Barat. Kemudian pada tahun 2021 penulis dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

...BOLEH JADI KAMU TIDAK MENYUKAI SESUATU,
PADAHAL ITU BAIK BAGIMU,
DAN BOLEH JADI KAMU MENYUKAI SESUATU,
PADAHAL ITU TIDAK BAIK BAGIMU.
ALLAH MENGETAHUI,
SEDANGKAN KAMU TIDAK MENGETAHUI.

(Q.S. AL-BAQARAH : 216)

PERSEMBAHAN

Sebuah Kado Sederhana kupersembahkan kepada:

ZHAFRAN AKARA ADLI

Anak

EDI PRAMUDYA DAN LUSITA ANJELINA.

Titipan paling berharga yang telah merubah segalanya.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tesis yang berjudul “**Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Pada Pelayanan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain Edi Pramudya suamiku tercinta terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang tercurah kepada istrimu dan buah hati kita Zhafran Akara Adli. Semoga Allah selalu memberkahi keluarga kecil kita, kalian segalanya bagi Bunda. Bunda sayang Ayah dan Zhafran selamanya.

Kedua Orang Tuaku, Ibu Rita Zahara sosok perempuan luar biasa yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keluarga. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang, yang telah ibu curahkan kepada kami. Bapak John Alfian ayahku tecinta terima kasih telah mencintaiku dengan cara ayah sendiri.

Kedua Mertuaku, Ibu Masnuri dan Bapak Miswan terima kasih untuk cinta dan kasih sayang serta doa untuk kami. Ibu dan bapak orang tua hebat yang selalu semangat dan berjuang mendukung keberhasilan anak-anaknya.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T.selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku pembimbing utama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi tersusunnya tesis ini;
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.I.P Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesisi ini;
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
9. Seluruh informan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2018;
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis,

LUSITA ANJELINA
NPM 1826021010

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah	13
1.3	Tujuan Penelitian	13
1.4	Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Tinjauan Tentang Daerah Tertinggal	15
2.2	Tinjauan Tentang Strategi	17
2.3	Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)	20
2.4	Tinjauan Tentang Pelayanan Dasar.....	29
2.5	Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN		
3.1	Tipe Penelitian	38
3.2	Fokus Penelitian	48
3.3	Narasumber/Informan	50
3.4	Daftar Pertanyaan/Kuesioner	51
3.5	Jenis dan Sumber Data	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.7	Teknik Analisis Data.....	54
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT		
4.1	Sejarah Kabupaten Pesisir Barat	55
4.2	Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat	57
4.3	Keadaan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat	59
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1	Pelayanan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat.....	60
5.2	Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.....	76
5.2.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan.....	77
5.2.2	Peningkatan Pelayanan Pendidikan.....	110
5.2.3	Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi.....	125
5.3	Hasil <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	146

5.3.1	Deskripsi Jawaban Responden	146
5.3.2	Analisis Hasil Perhitungan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	156
5.3.2.1	Pelayanan Kesehatan	157
5.3.2.2	Pelayanan Pendidikan.....	164
5.3.2.3	Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi	171
5.3.3	Skala Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.....	178
5.3.3.1	Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi	187
5.3.3.2	Pelayanan Kesehatan	189
5.3.3.3	Pelayanan Pendidikan.....	192
5.4	Pembahasan.....	194
5.4.1	Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	194
5.4.2	Skala Prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	203
5.4.2.1	Aspek Pelayanan Kesehatan.....	203
5.4.2.2	Aspek Pelayanan Pendidikan	205
5.4.2.3	Aspek Peningkatan Pembangunan Sosial dan Ekonomi.....	207
5.4.2.4	Skala Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.....	208
5.4.3	Permodelan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.....	221
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Simpulan	228
6.2	Saran.....	232

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2019 (Ribu Jiwa).....	3
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (tidak sekolah-Sarjana) di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019.....	3
Tabel 3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2016-2018.....	6
Tabel 4.	Penelitian Terdahulu	8
Tabel 5.	Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP.....	28
Tabel 6.	Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP.....	29
Tabel 7.	Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP.....	46
Tabel 8.	Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP.....	47
Tabel 9.	Tingkat Kepentingan Relatif Tujuan-Tujuan.....	52
Tabel 10.	Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	58
Tabel 11.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	59
Tabel 12.	Harapan Lamanya Sekolah dan Rata-Rata Lamanya Sekolah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020.....	61
Tabel 13.	Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	62
Tabel 14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	63
Tabel 15.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	63
Tabel 16.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2020.....	65
Tabel 17.	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020	65
Tabel 18.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2018-2020 (dalam juta rupiah).....	66
Tabel 19.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	68
Tabel 20.	Produktivitas Padi dan Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	69
Tabel 21.	Luas Dan Jenis Kawasan Hutan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	71

Tabel 22.	Jenis dan Jumlah Tangkapan Ikan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	73
Tabel 23.	Populasi Ternak Besar dan Kecil Per Kecamatan Tahun 2020.....	73
Tabel 24.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	74
Tabel 25.	Sebaran Potensi Ekowisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat	75
Tabel 26.	Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat	75
Tabel 27.	Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020.....	89
Tabel 28.	Situasi Sarana Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	95
Tabel 29.	Situasi Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	96
Tabel 30.	Indikator Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2021.....	97
Tabel 31.	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	98
Tabel 32.	Prosentase Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	99
Tabel 33.	Komposisi Jumlah Keluarga Penerima Pinjaman Dana Bergulir	134
Tabel 34.	Jumlah Pinjaman Bergulir Setiap Tahap dan Waktu Peminjaman.....	135
Tabel 35.	Jumlah BUMPekon se-Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	138
Tabel 36.	Tabulasi Prioritas Pertama Fasilitas Alat Kesehatan	147
Tabel 37.	Tabulasi Prioritas Kedua Layanan pada Bagian Poli	148
Tabel 38.	Tabulasi Prioritas Ketiga Ketepatan Layanan.....	148
Tabel 39.	Tabulasi Prioritas Keempat Biaya.....	149
Tabel 40.	Tabulasi Prioritas Kelima Tingkat Kemudahan.....	150
Tabel 41.	Tabulasi Prioritas Pertama Program Berkualitas	151
Tabel 42.	Tabulasi Prioritas Kedua Kesesuaian Program dan Pelaksanaan	152
Tabel 43.	Tabulasi Prioritas Ketiga Pemerataan Pendidikan	153
Tabel 44.	Tabulasi Prioritas Pertama Program pemberdayaan Masyarakat	154
Tabel 45.	Tabulasi Prioritas Kedua Meningkatkan Jumlah <i>Home Industry</i>	155
Tabel 46.	Tabulasi Prioritas Ketiga Pemanfaatan SDA	155
Tabel 47.	Tabulasi Skala Prioritas Pelayanan Kesehatan	179
Tabel 48.	Tabulasi Skala Prioritas Pelayanan Pendidikan	180

Tabel 49.	Tabulasi Skala Prioritas Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi	180
Tabel 50.	Hasil Pengolahan AHP Aspek Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahu 2021	209
Tabel 51.	Hasil Pengolahan AHP Aspek Layanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahu 2021	216
Tabel 52.	Hasil Pengolahan AHP Aspek Layanan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat Tahu 2021	218

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Barat.....	4
Gambar 2.	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pesisir Barat ..	5
Gambar 3.	Hirarki dalam AHP	24
Gambar 4.	Penentuan Strategi yang Telah Siap untuk Dijalankan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dengan Teknik AHP	25
Gambar 5.	Klasifikasi Urusan Pemerintahan.....	31
Gambar 6.	Kerangka Pikir	37
Gambar 7.	Hirarki dalam AHP	42
Gambar 8.	Penentuan Strategi yang Telah Siap untuk Dijalankan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dengan Teknik AHP	43
Gambar 9.	Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Bara	59
Gambar 10	Nilai Persentase Layanan kesehatan	158
Gambar 11	Goal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Aspek Layanan Kesehatan	160
Gambar 12.	Grafik Aspek Layanan Kesehatan	162
Gambar 13.	<i>Head to Head</i> Kriteria Prioritas pada Layanan Kesehatan	163
Gambar 14.	Nilai Persentase Layanan Pendidikan	165
Gambar 15.	Goal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Aspek Layanan Pendidikan.....	167

Gambar 16. Grafik Aspek Layanan Pendidikan	169
Gambar 17. <i>Head to Head</i> Kriteria Prioritas pada Layanan Pendidikan.....	170
Gambar 18. Nilai Persentase Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi.....	172
Gambar 19. Goal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Aspek Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi.....	174
Gambar 20. Grafik Aspek Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi.....	176
Gambar 21. <i>Head to Head</i> Kriteria Prioritas pada Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi	177
Gambar 22. Nilai Persentase Skala Prioritas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi	182
Gambar 23. Penentuan Strategi Skala Prioritas yang Siap untuk Dijalankan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat	183
Gambar 24. Hirarki Analisis Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi.....	185
Gambar 25. Nilai Persentase Percepatan Pembangunan di Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pelayanan Pendidikan dan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi.....	222
Gambar 26. Grafik Percepatan Pembangunan di Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pelayanan Pendidikan dan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi	224
Gambar 27. Nilai Skala Prioritas yang Seharusnya Dijalankan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat	227

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan tingkat kebhinekaan yang tinggi. Perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Akibatnya wilayah-wilayah dengan potensi sumber daya alam dan lokasi menguntungkan yang seharusnya berkembang dan menciptakan percepatan pembangunan bagi wilayah-wilayah yang tertinggal tidak muncul secara optimal. Sehingga pembangunan regional berimbang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang tercipta dari sinergitas interaksi antar wilayah juga tidak tercapai secara optimal (Anwar, 2015:182).

Secara makro dapat terlihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara desa dan kota, antara wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan sebagainya, walaupun pemerataan pembangunan daerah sudah berusaha dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo namun faktanya hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan dan masih terdapat banyak ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Dampak ketimpangan wilayah adalah persoalan daerah tertinggal. Masalah ketimpangan pembangunan ini merupakan permasalahan disparitas wilayah

yang membahayakan kesatuan nasional terutama pada pemerintah daerah di wilayah perbatasan dan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, menjelaskan bahwa suatu daerah tertinggal didasarkan enam kriteria yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) sarana dan prasarana (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah.

Tiga kriteria yang paling utama untuk dimaksimalkan serta menjadi dasar sebuah pelayanan untuk mengembangkan kriteria-kriteria lainnya. Tiga kriteria tersebut adalah pemberian pelayanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan dan peningkatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tertinggal, (Salusu, 2016:29).

Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dasar di daerah tertinggal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam peraturan tersebut terdapat 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Di Provinsi Lampung hanya ada satu kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal yaitu Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 22 April 2013 beribu kota di Krui yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat. Dasar pembentukan Kabupaten Pesisir Barat adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 belum berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena sektor konstruksi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masih belum bisa dimaksimalkan. Berikut ini adalah tabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2019:

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2019 (Ribuan Jiwa)

No	Tingkat Kemiskinan				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	24	24.20	23.76	22.98	22.38

Sumber: LPPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat setiap tahunnya mengalami penurunan namun tidak signifikan dan relatif masih cukup besar, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir juga berdampak pada pelayanan dasar mulai dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial ekonomi. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih kurang memadai hal itu dikarenakan sebaran dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih belum merata. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019.

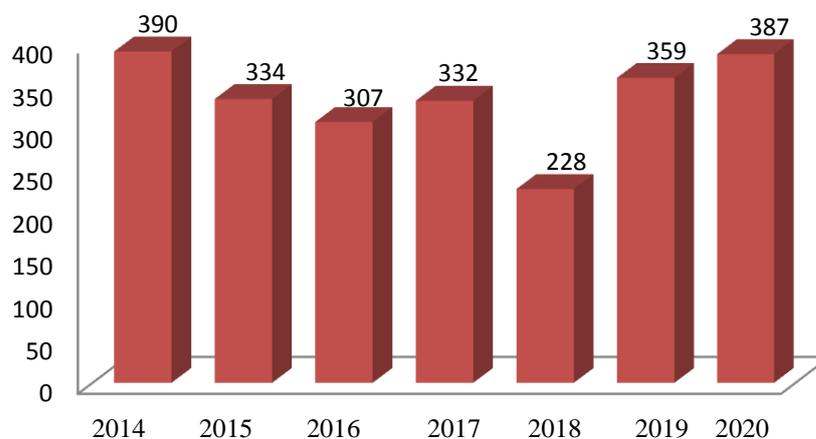
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (tidak sekolah-Sarjana) di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	Des/ Kel	Tingkat Pendidikan							
			Tidak sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SMA	Diploma	SI	S2 dan S3
1	Pesisir Selatan	15	2925	3561	8103	4597	3872	269	192	18
2	Pesisir Tengah	8	3015	2536	3235	3774	4339	1130	414	48
3	Pesisir Utara	12	873	1550	2467	1441	2002	309	161	5
4	Karya Penggawat	12	2249	1461	4709	3031	3592	180	143	9
5	Lemong	13	2078	1885	4859	2622	1947	137	67	12
6	Ngaras	9	1406	2436	2680	959	1173	190	76	3
7	Ngambur	9	3889	2566	7115	3068	2268	154	110	14
8	Bangkunat	14	5912	4422	4986	4565	3836	171	110	1
9	Way Krui	10	364	239	1088	2214	2980	2110	377	175
10	Krui Selatan	10	1733	1319	2652	2283	2350	154	93	0
11	Pulau Pisang	6	284	108	398	483	451	181	59	1
Jumlah		148	24692	22083	42292	29037	28810	4985	1802	286
Jumlah Penduduk		154135								

Sumber: Disdukcapril Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019

Ketidakmerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat juga berdampak pada masih ditemukannya masyarakat yang tidak melek huruf. Pada tahun 2018 ada sekitar 1.74% penduduk di usia 15 tahun ke atas di Kabupaten yang tidak bisa membaca dan menulis artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada dua orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Pesisir Barat relatif sudah baik dimana angka partisipasi sekolah sudah mencapai 100%. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan rata-rata lama sekolah dimana angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Barat masih rendah.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan di kabupaten Pesisir Barat masih perlu untuk di tingkatkan hal itu dikarenakan pencapaian target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pesisir Barat belum mampu dicapai dengan maksimal.

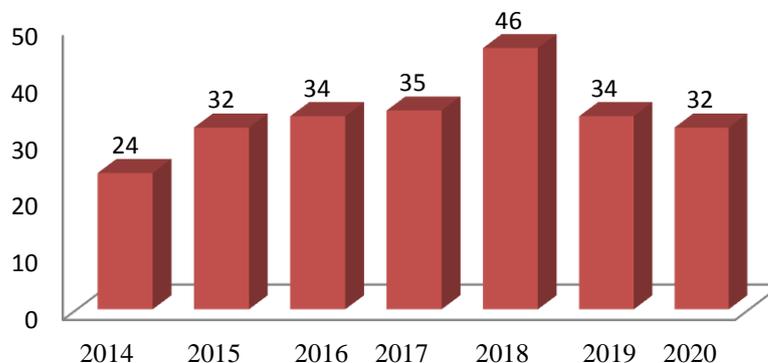


Gambar 1. Grafik Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pesisir Barat mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2020 angkanya relatif cukup tinggi dan relatif mengalami kenaikan. Padahal bila dibandingkan dengan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Indonesia pada tahun 2020, Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) hanya turun sedikit dari pencapaian tahun 2020, yaitu dari 34 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Tahun 2021

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pesisir Barat mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, bahkan di tahun 2018 Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami kenaikan signifikan sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup angka ini lebih tinggi di bandingkan tahun 2020 yang relatif mengalami penurunan walaupun tidak tajam yaitu sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Indonesia pada tahun 2020 untuk indikator Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Sangat jauh pencapaian dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) saat ini. Penyebab kematian bayi di tahun 2020 di dominasi oleh bayi yang terlahir secara prematur yaitu sebanyak 7 bayi atau 22% dari Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 32 Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sudah menjadi konsensus nasional dan global. Pemerintah belum optimal merancang program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam 5 tahun belakangan ini tidak seriusnya pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat terlihat dari minimnya program

penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta alokasi anggaran yang relatif sedikit.

Terakhir adalah sosial ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat relatif mengalami peningkatan namun tidak signifikan hal itu terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018, hal itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2016-2018

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)		Pertumbuhan PDRB Perkapita
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Atas Dasar Harga Konstan (ADKH)	
2016	23.898.951,63	17.546.288,31	4,33
2017	25,974.414,46	18.330.636,89	4,47
2018	27.986.512,93	19.159.037,81	4,52

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2019

Meningkanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Barat juga berdampak pada meningkatnya standar hidup layak diketahui bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 7,16 juta per tahun maka pada tahun 2018 sudah mencapai 8,35 juta per tahun. Namun jika dilihat dari jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Barat relatif mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka relatif fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2015 angka pengangguran terbuka sebanyak 3.502 orang menurun pada tahun 2017 sebanyak 2.142, tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 1.360 orang dan pada tahun 2019 angka pengangguran terbuka mengalami kenaikan tajam menjadi 2.469 orang. Pada hal jika melihat potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Pesisir Barat sangat besar yang belum dimiliki oleh daerah lain mulai potensi tersebut mulai dari kehutanan, perkebunan, bahkan juga pertambangan, mulai dari tambang emas, biji besi, batu, dan banyak sekali potensi di bidang pertambangan selain itu potensi pariwisata Pesisir Barat memiliki 17 titik yang menjadi tujuan wisata mancanegara serta potensi kelautan .

Melihat besarnya potensi di Kabupaten Pesisir Barat maka harus bisa dilakukan pengelolaan secara maksimal sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal serta masyarakat Kabupaten Pesisir Barat akan semakin sejahtera dikarenakan adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat di daerah tertinggal yang akan berdampak pada kemudahan aksesibilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, oleh sebab itu diperlukan adanya strategi yang tepat, strategi pokok pembangunan daerah tertinggal meliputi: Pertama, pembangunan prasarana, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat prasarana dalam hal ini adalah pembangunan sekolah-sekolah yang ada di masing-masing kecamatan sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses pendidikan.

Kedua, membangun kelembagaan pada masing-masing kecamatan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian di daerah seperti lembaga keuangan.

Ketiga, memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah, dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang ada di daerah. Keempat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa-desa tertinggal agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.

Berdasarkan penjelasan di atas maka untuk memperkuat hasil penelitian yang peneliti lakukan penulis menambahkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	Sari dan Sarah Meirina (2018), Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bondowoso	Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa <i>input</i> terdiri dari kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, dan analisis kebijakan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. <i>Output</i> kebijakan ini yaitu dari kelima puluh lima kegiatan dalam kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. <i>Outcome</i> kebijakan ini yaitu pada tahun 2017 pada 3 (tiga) dimensi ketertinggalan Kabupaten Bondowoso yang masih kurang yaitu perekonomian, sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan daerah terbilang naik.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pelayanan pada sektor pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi. Sementara penelitian terdahulu hanya berfokus pada pembangunan ekonomi yang ada di desa yang hanya mencakup ekonomi rakyat dan peningkatan sumber daya manusia dan keuangan daerah. Sedangkan kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peningkatan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian.
2	Zainal Abidin (2019), Kebijakan Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal: dari Jalan Kaki Hingga Mesin Transportasi	Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh pemerintah di Jalan trans Mentawai kurang berjalan maksimal Gencarnya pemerintah dalam menargetkan percepatan pembangunan pada daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan sebuah impian bagi pemerintah daerahnya. Akan tetapi berbagai persoalan yang mustinya dapat	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pengembangan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk memudahkan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi sedangkan dalam penelitian ini fokus pada seluruh pembangunan pokok daerah tertinggal mulai dari pembangunan khususnya pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi. Sedangkan kesamaan

			<p>dipahami dalam konteks budaya dan tradisi juga harus dipertimbangkan sehingga hal ini menyebabkan proyek pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan macet karena terbatasnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat serta pembangunan daerah tertinggal yang belum berbasiskan masyarakat.</p>	<p>dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas percepatan pembangunan daerah dari sektor infrastruktur sarana dan prasarana</p>
3	<p>Mita Yesyca (2018), Percepatan Pembangunan di Empat Daerah Tertinggal di Jawa Timur: Perspektif Feminis</p>	<p>Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan interaksi antara gender dan ketimpangan ekonomi dalam hidup laki-laki dan perempuan di daerah-daerah tertinggal, khususnya di Jawa Timur, simpulan dari tulisan ini adalah bahwa program-program yang menitikberatkan pada pelibatan perempuan pedesaan agar dapat membuka akses mereka terhadap pasar belum tentu memberdayakan perempuan pedesaan dalam artian mentransformasi posisi mereka yang timpang terhadap keutamaan laki-laki dalam ekonomi. Pemberdayaan yang transformatif inilah yang sudah seharusnya tetap menjadi agenda pembangunan daerah-sensitif gender</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdahulu lebih terfokus pada pemberdayaan ekonomi di kalangan perempuan agar tidak terjadi ketimbangan antara peran perempuan dengan laki-laki di sektor perekonomian pada masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal sementara itu dalam penelitian ini berfokus pada aspek semua kalangan baik perempuan maupun laki-laki hal itu dikarenakan dalam penelitian ini untuk melihat skala prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi untuk semua kalangan sehingga kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah sama rata dan berkeadilan Sedangkan kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang, ekonomi dan sumber daya manusia</p>

4	Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto, Arivina Ratih Taher (2018), Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat	Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa target pengembangan yang harus diprioritaskan adalah membangun infrastruktur pendukung pertanian untuk mengembangkan area pusat komoditas terkemuka	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan analisis SWOT sedangkan dalam penelitian ini analisis data menggunakan AHP
5	Almasdi Syahza dan Suarman (2013), Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Strategi pengembangan desa tertinggal di kabupaten Bengkalis adalah pembangunan sektor pertanian berbasis agribisnis, karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan); 2). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Kebodohan); 3). Pembangunan Infrastruktur.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan desa sebagai objek daerah tertinggal dan terfokus pada aspek peningkatan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan tingkat kabupaten sebagai daerah tertinggal dengan memfokuskan pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi
6	Ahmad Yusuf Rangkuti (2017), Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Strategi yang menjadi prioritas utama adalah meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah propinsi dengan kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan dengan nilai (TAS) sebesar 6.079. Adapun nilai TAS terendah pada strategi membangun	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan QSP dalam menentukanskala prioritas sedangkan dalam penelitian ini menggunakan AHP dalam penentuan skala prioritas serta dalam penelitian menggabungkan antara

			database dan menerapkan deteksi dini akan terjadinya bencana alam dengan nilai TAS 4.642	data kualitatif dengan data kuantitatif
7	Andi Setiono (2019), Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Ekonomi Islam	Pendekatan dan desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat strategi utama untuk pengembangan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan cara memadukan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berbasis potensi sumberdaya lokal melalui : (a) Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. (b) Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah. (c) Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. (d) Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peningkatan percepatan pembangunan melalui aspek ekonomi pemanfaatan SDA. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada aspek kesehatan, pendidikan dan aspek ekonomi

Jika dipahami dalam tabel 4 di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu Sari dan Sarah Meirina (2018) kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal ditujukan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah sehingga diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana untuk memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal, seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin (2019) yang

menjelaskan bahwa prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah membangun sarana dan prasarana sebagai infrastruktur untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Mita Yesyca (2018) yang menjelaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat dilaksanakan dengan maksimal jika pemerintah daerah mampu memaksimalkan kegiatan perekonomian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto, Arivina Ratih Taher (2018), strategi pembangunan daerah tertinggal di tujukan untuk pendukung pertanian untuk mengembangkan area pusat komoditas dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Almasdi Syahza dan Suarman (2013), menjelaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan untuk mendukung sektor pertanian berbasis agribisnis sebagai langkah untuk mendukung percepatan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Ahmad Yusuf Rangkuti (2017), menjelaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan cara meningkatkan sinergisitas baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten untuk mendukung program-program peningkatan ekonomi di pedesaan yang masuk daerah tertinggal. Andi Setiono (2019), menjelaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan melakukan percepatan dibidang ekonomi dengan memprioritaskan potensi perikanan dan kelauatan, pengelolaan pariwisata, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum.

Penjelasan tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian yang akan peneliti kaji dimana dalam penelitian ini peneliti ingin melihat prioritas pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat mulai dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sehingga strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat sangat penting dilakukan dengan tujuan Kabupaten Pesisir Barat akan benar-benar keluar dari daerah tertinggal yang berada di perbatasan maka dalam strategi kebijakannya harus memperhatikan penyebab dari terjadinya kesenjangan

atau *gap* masalah-masalah tersebut, dengan tetap mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan aksesibilitas. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi pada Pelayanan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah pokok yang menjadi landasan penelitian adalah bahwa meskipun telah ditetapkan strategi-strategi dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat namun kenyataannya Kabupaten Pesisir Barat belum bisa keluar dari predikat kabupaten tertinggal sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dilihat dari bidang pelayanan kesehatan, bidang pelayanan pendidikan dan bidang pembangunan sosial ekonomi?
2. Apa yang menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dilihat dari bidang pelayanan kesehatan, bidang pelayanan pendidikan dan bidang pembangunan sosial ekonomi?
3. Bagaimanakah permodelan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dilihat dari bidang pelayanan kesehatan, bidang pelayanan pendidikan dan bidang pembangunan sosial ekonomi

2. Untuk mengetahui dan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dilihat dari bidang pelayanan kesehatan, bidang pelayanan pendidikan dan bidang pembangunan sosial ekonomi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis permodelan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan teori pemerintahan, maupun teori sosial khususnya berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk lebih mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui optimalisasi pelayanan dasar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Daerah Tertinggal

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014:19), wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014:81-84) wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu wilayah tertinggal di pedalaman dan wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil.

1. Kondisi wilayah tertinggal di pedalaman
 - a. Kondisi sumber daya alam sangat rendah (kesuburan tanahnya yang rendah, rawan longsor, rawan banjir, terbatasnya sumber daya

- air, daerah dengan topografi yang terjal, tanah berawa-rawa/gambut);
- b. Sumberdaya alamnya mempunyai potensi, namun daerah tersebut belum berkembang/terbelakang. Kondisi geografis pada umumnya di daerah yang tidak terjangkau, sehingga walaupun lokasinya relatif dekat, namun tidak tersedia akses dari wilayah tersebut ke wilayah pusat pertumbuhan. Penguasaan dan penerapan teknologi yang relatif rendah dikarenakan kurangnya pembinaan dan keterbatasan dukungan prasarana teknologi itu sendiri;
 - c. Ketersediaan atau keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, air irigasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya menyebabkan wilayah tertinggal tersebut makin sulit untuk berkembang;
 - d. Tingginya kesenjangan ekonomi antar daerah (misalnya antara pantai/pesisir dengan pedalaman). Struktur sosial ekonomi masyarakat terbagi dalam beberapa tingkatan misalnya masyarakat tradisional, semi modern dan masyarakat modern;
 - e. Rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan lokal misalnya ibukota kecamatan. Biaya transportasi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual komoditi;
 - f. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat.
2. Kondisi wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil
- a. Kondisi masyarakat pulau-pulau kecil di wilayah terpencil masih sangat marjinal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan;
 - b. Terdapat 88 pulau kecil yang bertitik dasar dan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil sulit dijangkau dan tidak berpenghuni;

- d. Kondisi pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun akibat kegiatan manusia;
- e. Adat istiadat, budaya dan agama masyarakat pulau-pulau kecil yang spesifik dan pada umumnya bertentangan dengan adat, budaya yang dibawa oleh pendatang/wisatawan, sehingga akan menghambat proses pembaharuan.

2.2 Tinjauan Tentang Strategi

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan (administrasi negara) untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

McNichols (dalam Salusu, 2016:71) menyatakan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan kerangka dasar organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan. Strategi yang dibuat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan, seperti halnya strategi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah tertinggal maka diperlukan adanya manajemen strategi yang baik, beberapa fungsi dari

manajemen strategis, menurut George R. Terry dalam Rahmad (2019:14-20), menjelaskan bahwa fungsi manajemen strategis meliputi 4 (empat) fungsi antara lain:

a. *Planning* (Fungsi Perencanaan)

Planning (perencanaan) merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan pada sebuah daerah yang akan berkembang. Untuk daerah tertinggal ada 4 (empat) aktivitas dalam fungsi perencanaan antara lain:

1. Menetapkan arah tujuan serta target dari sebuah program atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. Menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut;
3. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program atau kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah daerah
4. Menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan program atau kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah daerah.

b. *Organizing* (Fungsi Pengorganisasian)

Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh daerah untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan daerah. Indikator yang ada didalam *organizing* adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan program yang ada di daerah tertinggal
2. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas semua program pembangunan daerah tertinggal
3. Mengembangkan kegiatan pemberdayaan mulai dari pelatihan, permodalan dan pendampingan

4. Membuka lapangan pekerjaan untuk memmpercepat penyerapan tenaga kerja.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan di daerah tertinggal yang memiliki permasalahan cukup kompleks. Dalam proses pelaksanaan terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan antara lain:

1. Mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada bawahan supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu mempercepat pembangunan agar keluar dari daerah tertinggal
2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan kepada seluruh pegawai yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah tertinggal
3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan untuk mempermudah pelaksanaan program sehingga program bisa dilaksanakan dengan terarah dan tepat.

d. *Controlling* (Pengendalian)

Controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan, namun juga melakukan koreksi-koreksi apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Aktivitas yang bisa dilaksanakan dalam fungsi *controlling* adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah
2. Melakukan koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal

3. Memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk memaksimalkan dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Berdasarkan penjelasan di atas strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen strategi oleh George R. Terry yang dikembangkan oleh Rahmad yang meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengendalian). Teori ini dipilih dikarenakan aspek-aspek yang dikembangkan dalam teori ini cukup relevan, saling berkaitan, bisa diterapkan serta di kelola dengan baik sehingga program percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat dicapai sesuai dengan keinginan dari pemerintah daerah.

2.3 Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

1. Pengolahan Data dengan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu model yang luwes yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai pribadi secara logis, dapat menyusun skala baru untuk mengukur sifat-sifat yang telah terjadi. Adapun pengelompokan daerah atau regional yang secara agregat berada dalam kelompok dengan karakteristik yang sama dikelompokkan dengan menggunakan metode *cluster analysis* dan dianalisis lebih lanjut dengan metoda *descriptive analysis*.

Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan

yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, member nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. (Saaty, 2008:4).

Menurut Saaty (2008:9), ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (*Decomposition*), prinsip menentukan prioritas (*Comparative Judgement*), dan prinsip konsistensi logis (*Logical Consistency*). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteriakriteria atau komponenkomponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi.

Saaty (2008:27) mengatakan bahwa AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan

suatu unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. Secara umum, langkah-langkah dasar dari AHP dapat diringkas dalam penjelasan berikut ini:

- a. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternative
- b. Menyusun masalah dalam struktur hirarki. Setiap permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terstruktur
- c. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hirarki. Proses ini menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Langkah pertama pada tahap ini adalah menyusun perbandingan berpasangan yang ditransformasikan dalam bentuk matriks, sehingga matriks ini disebut matriks perbandingan berpasangan

Ada 3 (tiga) prinsip dasar dalam AHP, antara lain:

- a. Memecah-mecah persoalan dan menyusun secara hierarki
Yaitu persoalan yang kompleks dipecah-pecah menjadi unsur yang terpisah-pisah, lalu menyusun secara hierarkis.
- b. Penetapan prioritas
Elemen-elemen yang disusun secara hierarkis ditentukan prioritasnya dengan mensintesis pertimbangan kita terhadap elemen-elemen menurut relatif pentingnya atau yang lebih disukai. Untuk hal tersebut kita harus melakukan perbandingan berpasangan antara elemenelemen tersebut dan melakukan suatu pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan satu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen dimaksud.
- c. Konsistensi Logis
Konsistensi logis diperlukan dalam menetapkan prioritas untuk elemen-elemen agar memperoleh hasil yang akurat dalam dunia nyata. Konsistensi ada 2 (dua) hal penting yaitu:

- 1) Bahwa obyek serupa dikelompokkan secara homogenitas atau secara relevansinya. Contoh: Jeruk dengan Mangga
- 2) Didasarkan pada kriteria tertentu, yang saling membedakan secara logis. Contoh: Tembaga dua kali lebih lunak dari pada besi. Timah tiga kali lebih lunak dari pada tembaga, berarti Timah enam kali lebih lunak dari pada Besi.

2. *Forward Process*

Dalam metode AHP terdapat dua jenis proses yang dikenal dengan *forward* dan *backward process*. Model proyeksi atau yang biasa disebut dengan *forward process* dimaksudkan untuk memperkirakan kondisi masa depan yang akan terjadi berdasarkan kondisi saat itu. Dalam pendekatan ini hirarkinya terdiri atas empat level yang terdiri dari tujuan, pelaku atau aktor, tindakan dan alternatif kebijakan. Model ini menggunakan empat level karena dalam merencanakan proses pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan dan mengetahui tindakan apa yang harus diprioritaskan, untuk mencapai tujuan yakni mempercepat Kabupaten Pesisir Barat keluar dari daerah tertinggal dengan membuat sebuah program prioritas. Hal ini perlu dilakukan memperhatikan terdapat sejumlah opsi yang bisa diambil oleh pemangku kebijakan namun keberhasilannya tidak dapat diprediksi memperhatikan kondisi yang terjadi sebelumnya.

Bentuk hirarki ini kemudian disusun sebagai berikut:

- a. Level 1 : Tujuan (Goal): menetapkan tujuan yang ingin dicapai
- b. Level 2 : Pelaku/aktor yang berperan dan mempengaruhi permasalahan
- c. Level 3 : Tindakan atau kebijakan diambil oleh masing – masing aktor/pelaku pada level 2
- d. Level 4 : Skenario/target di masa depan yang mungkin terjadi.

Dalam model ini antara level 2 dan 3 tidak harus simetris. Kemudian hirarki dalam model ini dapat digambarkan oleh gambar di bawah ini



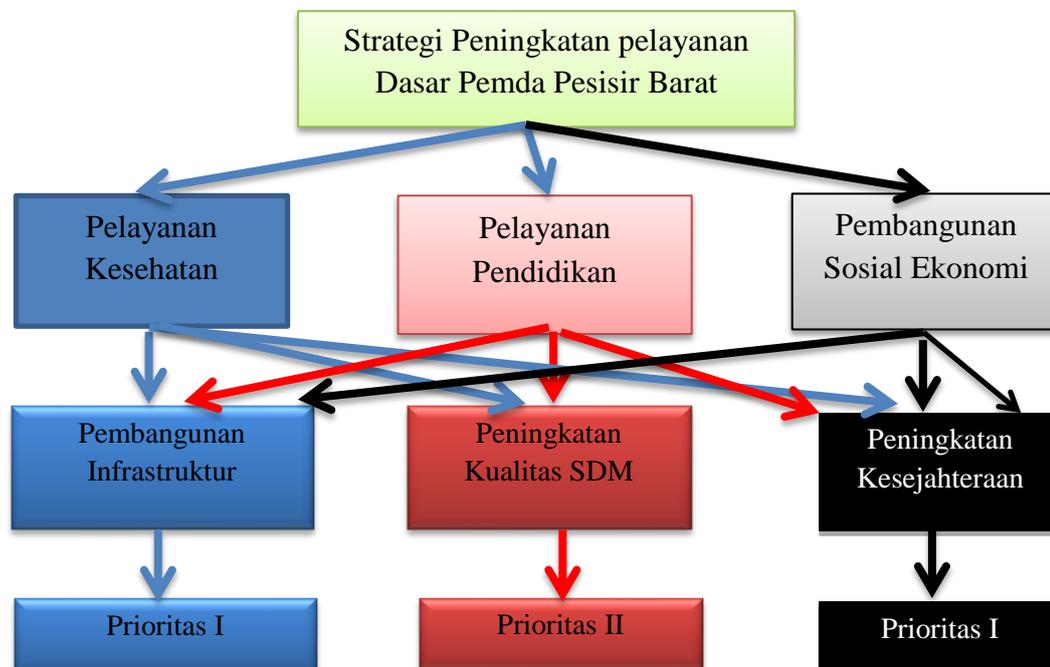
Gambar 3. Hirarki dalam AHP

3. *Backward Process*

Sedangkan model perencanaan yang biasa disebut dengan *backward process* bertujuan menentukan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Model ini terdiri atas lima level, antara lain:

- a. Level 1 : tujuan yaitu masa depan yang diinginkan dari suatu permasalahan
- b. Level 2 : Skenario/target yang diinginkan (mungkin sama dengan level 4 pada *forward process*)
- c. Level 3 : Masalah – masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian target yang diinginkan
- d. Level 4 : Aktor/pelaku yang berperan atau berpengaruh dalam pencapaian target (sama dengan level 2 pada *forward process*)
- e. Level 5 : Kebijakan – kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan

Hirarki dalam *backward process* dapat digambarkan oleh diagram di bawah ini:



Gambar 4. Penentuan Strategi yang Telah Siap untuk Dijalankan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dengan Teknik AHP

Forward dan *Backward Process* dapat berlangsung berkali – kali dengan beberapa modifikasi pada hierarkinya, terutama pada level 3 *forward* sebagai pengaruh dari level 5 *backward proses* sebelumnya. Pada proses berikutnya, biasanya elemen yang mendapat bobot kecil dihilangkan sehingga makin lama elemen yang dibandingkan makin sedikit sampai didapatkan suatu keadaan yang stabil, dimana urutan elemen tidak berubah lagi meskipun ada modifikasi pada level di atasnya. Penghubung utama kedua proses tersebut adalah skenario. Pada dasarnya untuk mencapai perencanaan yang lebih efektif, maka kedua model di atas dapat digabungkan.

Aplikasi model AHP secara garis besar dilakukan dalam dua tahap yaitu penyusunan hirarki yang lazim disebut dekomposisi dan evaluasi hirarki

Dekomposisi terdiri atas tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan yakni identifikasi level dan elemen, definisi konsep dan formulasi pertanyaan, (Brojonegoro, 1992:103).

Dekomposisi merupakan bagian terpenting dalam aplikasi model AHP, karena dari sini validasi dan kemampuan model dapat diuji. Langkah pertama dalam dekomposisi adalah mengidentifikasi level dan elemen yang akan ditempatkan dalam satu level. Selanjutnya semua level dan elemen tersebut diidentifikasi dan dipakai dalam tahap formulasi pertanyaan, (Brojonegoro, 1992:119).

Jika terjadi kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, maka level dan konsep tadi harus direvisi dan dimodifikasi. Dekomposisi sebenarnya merupakan proses iterasi dimana konsep-konsep, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya dapat menentukan elemen dan level suatu hirarki. Apabila terjadi ketidakjelasan atau kesalahan dalam proses menjawab pertanyaan-pertanyaan dapat membuat para pengambil keputusan memilih kriteria atau alternatif yang salah, untuk itu, sebaiknya semua pertanyaan seharusnya dapat dijawab secara konsisten berdasarkan informasi yang tersedia.

Proses menyusun hirarki secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki yang biasa disebut dengan goal yakni masalah yang akan dicari pemecahannya lewat model AHP. Setelah itu menentukan kriteria yang diperlukan untuk mendukung tujuan keseluruhan. Terakhir adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah kriteria.

Banyaknya level dalam hirarki tidak ada batasnya. Jika dalam suatu hirarki tidak mampu membandingkan elemen-elemen dalam suatu level terhadap elemen tingkat yang lebih tinggi berikutnya, maka harus diupayakan satu tingkat antara yang berarti memecah elemen-elemen dari tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Dalam pembuatan hirarki untuk

pemecahan konflik yang melibatkan banyak pelaku digunakan peralatan konsep perencanaan forward dan backward secara berulang. Level yang biasa dimasukkan dalam hirarki biasanya adalah kendala, pelaku, tujuan para pelaku, kebijakan dan hasil yang akan diharapkan.

4. Menyusun Hirarki

Setelah melakukan hierarki, proses selanjutnya adalah menimbang relatif pentingnya semua elemen dengan menggunakan skala perbandingan dengan angka 1-9. Berdasarkan penggunaan skala ini dan perbandingan kepentingan setiap elemen tersebut dinyatakan dalam matriks perbandingan berpasangan selanjutnya ditetapkan prioritasnya.

Dalam menimbang relatif pentingnya setiap elemen harus diterapkan prinsip konsistensi Logis : Jika emas 3 kali lipat mahal dibandingkan perak dan perak 3 kali lebih mahal dibandingkan tembaga, maka mahal nya emas adalah 9 kali lebih mahal dari tembaga. Prinsip konsistensi logis ini dikenal juga dengan *aksioma reciprocal*.

Pengisian persepsi *expert* dengan melakukan perbandingan antara elemenelemen dalam satu level dengan juga memperhatikan pengaruh level di atasnya, karena otak manusia ada batasnya, maka skala rasio itu juga harus mempunyai batas tertentu yang tidak terlampau besar tetapi cukup menampung persepsi manusia. Dalam model AHP digunakan batas 1 sampai 9 yang dianggap cukup mewakili persepsi manusia seperti tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 5. Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	<i>Equal Importance</i> (semua sama pentingnya)	Dua elemen menyumbang sama besar terhadap tujuan
3	<i>Moderate Importance of One Over Another</i> (Sedikit lebih penting)	Pengalaman dan penilaian agak menyukai sebuah elemen daripada yang lainnya
5	<i>Strong or Essential Importance</i> (Lebih penting)	Pengalaman dan penilaian kuat lebih menyukai sebuah elemen dari pada yang lainnya
7	<i>Very Strong or Demonstrated Importance</i> (Sangat lebih penting)	Sebuah elemen sangat kuat lebih disukai daripada yang lainnya: dominasinya kelihatan nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	<i>Extreme Importance</i> (Mutlak sangat penting)	Fakta sebuah elemen lebih disukai daripada yang lainnya berada pada kemungkinan yang tertinggi
2, 4, 6, 8	<i>Intermediate Values Reciprocals for Inverse Comparison</i>	Apabila kompromi diperlukan antara dua penilaian

Sumber: Saaty (2008:57)

Adanya suatu standar atau batasan tertentu dalam skala tersebut didasarkan beberapa alasan. *Pertama*, perbedaan hal-hal yang kualitatif akan mempunyai arti dan dapat dijamin keakuratannya apabila dibandingkan dalam besaran yang sama dan jelas. *Kedua*, adalah bahwa secara umum seseorang dapat menyatakan perbedaan hal-hal kualitatif dalam lain istilah yaitu, sama, lemah, kuat, sangat kuat dan absolut.

5. Menetapkan Prioritas

Sebenarnya dalam model AHP, penilaian/pemberian persepsi oleh satu orang saja sudah dapat dipakai dalam pengambilan keputusan apabila orang tersebut telah betul-betul memenuhi kriteria *expert* akan tetapi karena kurang jelasnya kriteria *expert* dan seringkali timbul keraguan akan kualitas seorang *expert*, maka model AHP biasanya menggunakan penilaian lebih dari satu orang (persepsi kelompok) terutama untuk suatu permasalahan yang harus dipecahkan dari berbagai sudut pandang. Dalam hal pengisian persepsi kelompok *expert* ada dua cara yang umumnya dipakai yaitu pertama seluruh *expert* berkumpul di suatu tempat dan mereka mengeluarkan data persepsi untuk satu perbandingan dan yang kedua adalah dengan cara pengisian kuesioner.

Cara kedua ini akan menghasilkan n persepsi ($n =$ jumlah responden/*expert*) untuk satu perbandingan seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP

No	Aksioma	Keterangan
1	<i>Reciprocal Comparison</i>	Sipengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.
2	<i>Homogeneity</i>	Preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya
3	<i>Independence</i>	Preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan
4	<i>Expectations</i>	Struktur hirarki diasumsikan lengkap. Ekspektasi dan persepsi manusia lebih menonjol daripada rasionalitas

Sumber: Saaty (2008:61)

2.4 Tinjauan Tentang Pelayanan Dasar

Menurut Poerwadarminto (2019:573), pelayanan berasal dari kata layan atau melayani yang berarti menolong, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Menurut Moenir (2015:6) pelayanan adalah kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada masyarakat yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan pelayanan. Sedangkan Sinambela (2018:71) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.

Salah satu bentuk pelayanan yang harus di penuhi oleh pemerintah adalah pelayanan dasar, menurut Dwiyanto (2015:141) mengatakan bahwa:

pelayanan dasar dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diberikan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial ekonomi. Sinambela (2018:71) juga menjelaskan bahwa pelayanan dasar adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, perumahan rakyat serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar masuk ke dalam urusan pemerintah, urusan pemerintah ada tiga yang pertama urusan pemerintah absolut, konkuren dan umum. Dari ketiga urusan pemerintah tersebut urusan pemerintah konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, pelayanan dasar merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib. Klasifikasi urusan pemerintahan dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 5. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Berdasarkan 5 pelayanan dasar yang disebutkan dalam regulasi tersebut ada tiga pelayanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah untuk dioptimalisasikan (Balilatfo, 2019:107) yaitu:

1. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal dasar yang diperlukan bagi tiap-tiap manusia untuk mengembangkan dirinya. Pendidikan juga dibutuhkan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Untuk membangun suatu daerah sehingga bisa menjadi daerah yang maju, SDM yang berkualitas sangatlah diperlukan, maka dari itu pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat krusial dalam usaha mengembangkan suatu daerah.

2. Pelayanan Kesehatan

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Nasional tersebut diselenggarakanlah program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan serta tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas.

3. Pembangunan Sosial Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu indikator terpenting untuk melihat apakah suatu daerah itu tergolong ke dalam daerah maju, berkembang atau tertinggal. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja pembangunan, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan suatu negara atau daerah. Analisis pelayanan dasar ekonomi di daerah tertinggal meliputi pelayanan dasar ekonomi yang termasuk ke dalam kelompok layanan barang (pasar) dan yang termasuk ke dalam kelompok layanan jasa (koperasi dan bank).

Untuk mewujudkan pelayanan dasar yang maksimal maka pemerintah membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan tingkat minimal pelayanan dasar dari negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga

diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur, (Tantowi, 2019:180).

Dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), di mana dalam ketentuannya terdapat 6 bidang pelayanan dasar yang harus di penuhi oleh pemerintah diantaranya:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Keberadaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Seperti hanya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 bidang pelayanan dasar tersebut namun berdasarkan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Barat, (2020:39-79), memprioritaskan 3 (tiga) bidang pelayanan dasar yaitu:

1. Pendidikan, bidang pendidikan dilaksanakan dengan membuat program antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas program tenaga pendidik, yang meliputi:
 1. Optimalisasi kegiatan pelatihan tenaga pendidik;
 2. Pelaksanaan program secara berkelanjutan;
 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program ke seluruh sekolah.

- b. Penyesuaian program dan pelaksanaan, yang meliputi:
 - 1. Pemenuhan fasilitas belajar bagi siswa/peserta didik;
 - 2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik/guru;
 - 3. Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik.
 - c. Pemerataan pendidikan, yang meliputi:
 - 1. Menurunkan angka putus sekolah;
 - 2. Kemudahan masyarakat melakukan akses layanan pendidikan;
 - 3. Pemberian jaminan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
2. Kesehatan, bidang kesehatan dilaksanakan dengan membuat program antara lain:
- a. Peningkatan fasilitas alat kesehatan, yang meliputi:
 - 1. Pengadaan alat kesehatan yang modern;
 - 2. Menambah jumlah anggaran untuk membeli alat-alat kesehatan yang modern;
 - 3. Memudahkan tenaga medis melakukan diagnosa.
 - b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di poli
 - 1. Menambah tenaga kesehatan spesialis
 - 2. Menyediakan obat-obatan yang berkualitas
 - 3. Memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan tepat.
 - c. Meningkatkan ketepatan layanan kesehatan:
 - 1. Pegawai teliti yang cermat dan teliti
 - 2. Ketepatan dalam memberikan layanan
 - 3. Pegawai memiliki kemampuan atau kompetensi dalam memberikan layanan kesehatan.
 - d. Penetapan biaya layanan
 - 1. Biaya kesehatan terjangkau oleh masyarakat
 - 2. Memberikan potongan biaya layanan kesehatan
 - 3. Memberikan jaminan biaya kesehatan yang murah dan terjangkau.

- e. Meningkatkan kualitas kemudahan akses layanan kesehatan, yang meliputi:
 - 1. Mempercepat proses layanan
 - 2. Adanya keterbukaan atau transparansi
 - 3. Meningkatkan responsifitas layanan kesehatan.

- 3. Sosial ekonomi, bidang dilaksanakan dengan membuat sebuah program antara lain:
 - a. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 2. Memberikan tambahan modal melalui kredit lunak
 - 3. Membantu masyarakat dalam memberikan akses layanan di perbankan.
 - b. Peningkatan jumlah *home industry*, yang meliputi:
 - 1. Melakukan pendampingan kepada pelaku *home industry*
 - 2. Meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif
 - 3. Membangun lembaga pelatihan bagi *home industry*.
 - c. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
 - 1. Melakukan penyerapan tenaga kerja lokal
 - 2. Meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat
 - 3. Meningkatkan daya beli masyarakat.

2.5 Kerangka Pikir

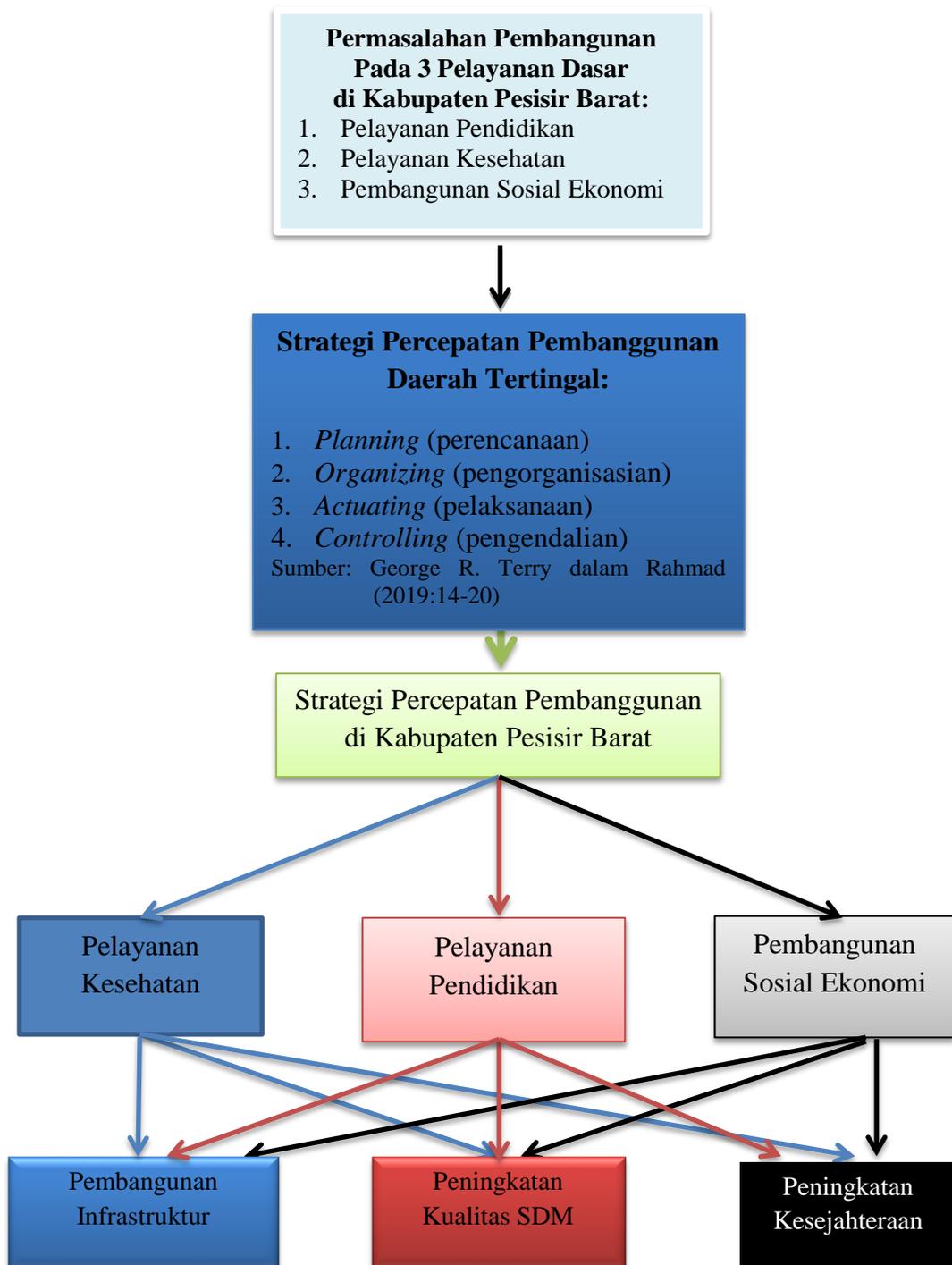
Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang mau dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, oleh sebab itu maka keberadaan fasilitas pendidikan didaerah tertinggal memerlukan

perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah, hal itu dikarenakan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal masih jauh di bawah standar nasional yang sudah ditetapkan. Dengan demikian permasalahan terkait dengan sulitnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kesejahteraan masyarakat yang rendah dikarenakan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal kepada masyarakat di daerah tertinggal sudah menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum mampu di selesaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu program pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan peningkatan pembangunan sosial ekonomi harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang cukup pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tertinggal.

Agar dalam pengambilan keputusan terkait dengan program percepatan daerah tertinggal sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat maka diperlukan manajemen strategis harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen strategis, menurut George R. Terry dalam Rahmad (2019:14-20), menjelaskan bahwa fungsi manajemen strategis meliputi 4 (empat) fungsi antara lain *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengendalian).

Dengan adanya strategi dalam memaksimalkan program pelayanan dasar maka pemerintah akan bisa merumuskan skala prioritas yang akan di utamakan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal tujuannya adalah agar kegiatan pembangunan daerah tertinggal bisa berjalan dengan seimbang dan daerah tertinggal akan keluar dari daerah tertinggal.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat peneliti gambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:



Gambar 6. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2013:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya dari alamiah adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013:14). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan wawancara guna menghimpun data jawaban atas kuisisioner yang telah disebarkan.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner, data tersebut diolah dengan menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*.

1. *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*

Metode *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* adalah suatu model yang luwes yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai pribadi secara logis, dapat menyusun skala baru untuk mengukur sifat-sifat yang telah terjadi. Adapun pengelompokan daerah atau regional yang secara agregat berada dalam kelompok dengan karakteristik yang sama dikelompokkan dengan menggunakan metode *cluster analysis* dan dianalisis lebih lanjut dengan metoda *descriptive analysis*.

Metode *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, member nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode AHP ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. (Saaty, 2008:4).

Menurut Saaty (2008:9), ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (*Decomposition*), prinsip menentukan prioritas (*Comparative Judgement*), dan prinsip konsistensi logis (*Logical Consistency*). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari

permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi.

Saaty (2008:27) mengatakan bahwa AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan suatu unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. Secara umum, langkah-langkah dasar dari AHP dapat diringkas dalam penjelasan berikut ini:

- a. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternative
- b. Menyusun masalah dalam struktur hirarki. Setiap permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terstruktur
- c. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hirarki. Proses ini menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Langkah pertama pada tahap ini adalah menyusun perbandingan berpasangan yang ditransformasikan dalam bentuk matriks, sehingga matriks ini disebut matriks perbandingan berpasangan

Ada 3 (tiga) prinsip dasar dalam AHP, antara lain:

- a. Memecah-mecah persoalan dan menyusun secara hierarki
Yaitu persoalan yang kompleks dipecah-pecah menjadi unsur yang terpisah-pisah, lalu menyusun secara hierarkis.

b. Penetapan prioritas

Elemen-elemen yang disusun secara hierarkis ditentukan prioritasnya dengan mensintesis pertimbangan kita terhadap elemen-elemen menurut relatif pentingnya atau yang lebih disukai. Untuk hal tersebut kita harus melakukan perbandingan berpasangan antara elemenelemen tersebut dan melakukan suatu pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan satu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen dimaksud.

c. Konsistensi logis

Konsistensi logis diperlukan dalam menetapkan prioritas untuk elemen-elemen agar memperoleh hasil yang akurat dalam dunia nyata. Konsistensi ada 2 (dua) hal penting yaitu:

4. Bahwa obyek serupa dikelompokkan secara homogenitas atau secara relevansinya. Contoh: Jeruk dengan Mangga
5. Didasarkan pada kriteria tertentu, yang saling membedakan secara logis. Contoh: Tembaga dua kali lebih lunak dari pada besi. Timah tiga kali lebih lunak dari pada tembaga, berarti Timah enam kali lebih lunak dari pada Besi.

2 *Forward Process*

Dalam metode AHP terdapat dua jenis proses yang dikenal dengan *forward* dan *backward process*. Model proyeksi atau yang biasa disebut dengan *forward process* dimaksudkan untuk memperkirakan kondisi masa depan yang akan terjadi berdasarkan kondisi saat itu. Dalam pendekatan ini hirarkinya terdiri atas empat level yang terdiri dari tujuan, pelaku atau aktor, tindakan dan alternatif kebijakan. Model ini menggunakan empat level karena dalam merencanakan proses pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan dan mengetahui tindakan apa yang harus diprioritaskan, untuk mencapai tujuan yakni mempercepat Kabupaten Pesisir Barat keluar dari daerah tertinggal dengan membuat sebuah program prioritas. Hal ini perlu dilakukan

memperhatikan terdapat sejumlah opsi yang bisa diambil oleh pemangku kebijakan namun keberhasilannya tidak dapat diprediksi memperhatikan kondisi yang terjadi sebelumnya.

Bentuk hirarki ini kemudian disusun sebagai berikut:

- a. Level 1 : Tujuan (Goal): menetapkan tujuan yang ingin dicapai
- b. Level 2 : Pelaku/aktor yang berperan dan mempengaruhi permasalahan
- c. Level 3 : Tindakan atau kebijakan diambil oleh masing-masing aktor/pelaku pada level 2
- d. Level 4 : Skenario/target di masa depan yang mungkin terjadi.

Dalam model ini antara level 2 dan 3 tidak harus simetris. Kemudian hirarki dalam model ini dapat digambarkan oleh gambar di bawah ini



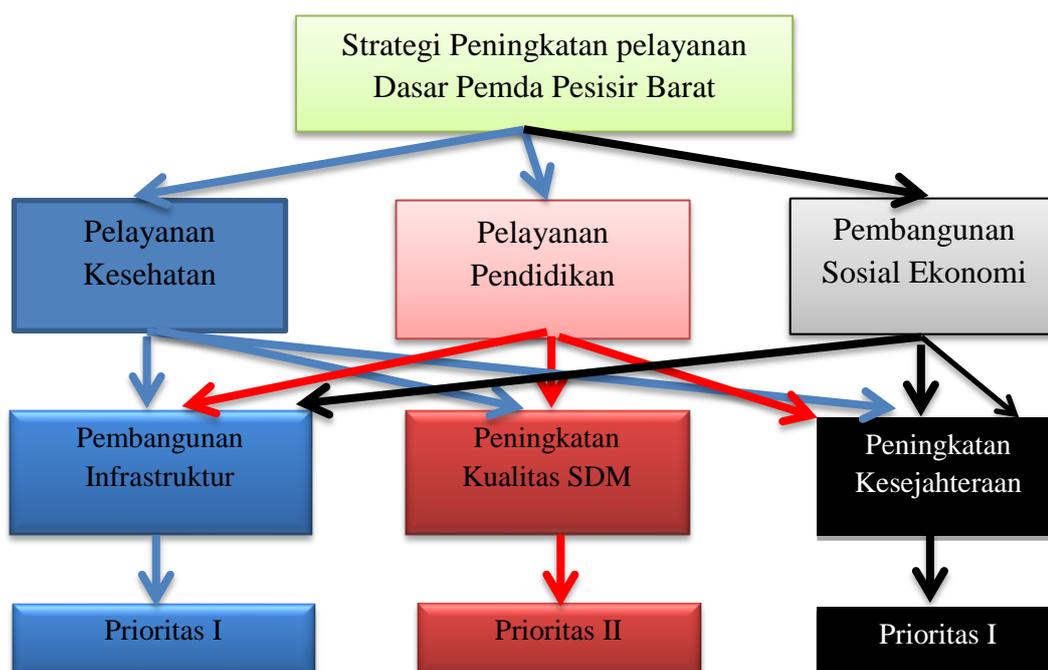
Gambar 7. Hirarki dalam AHP

3 *Backward Process*

Backward process bertujuan menentukan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Model ini terdiri atas lima level, antara lain:

- a. Level 1 : Tujuan yaitu masa depan yang diinginkan dari suatu permasalahan
- b. Level 2 : Skenario/target yang diinginkan (mungkin sama dengan level 4 pada *forward process*)
- c. Level 3 : Masalah – masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian target yang diinginkan
- d. Level 4 : Aktor/pelaku yang berperan atau berpengaruh dalam pencapaian target (sama dengan level 2 pada *forward process*)
- e. Level 5 : Kebijakan – kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan

Hirarki dalam *backward process* dapat digambarkan oleh diagram di bawah ini:



Gambar 8. Penentuan Strategi yang Telah Siap untuk Dijalankan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dengan Teknik AHP

Forward dan *Backward Process* dapat berlangsung berkali – kali dengan beberapa modifikasi pada hierarkinya, terutama pada level 3 *forward*

sebagai pengaruh dari level 5 *backward proses* sebelumnya. Pada proses berikutnya, biasanya elemen yang mendapat bobot kecil dihilangkan sehingga makin lama elemen yang dibandingkan makin sedikit sampai didapatkan suatu keadaan yang stabil, dimana urutan elemen tidak berubah lagi meskipun ada modifikasi pada level di atasnya. Penghubung utama kedua proses tersebut adalah skenario. Pada dasarnya untuk mencapai perencanaan yang lebih efektif, maka kedua model di atas dapat digabungkan.

Aplikasi model AHP secara garis besar dilakukan dalam dua tahap yaitu penyusunan hirarki yang lazim disebut dekomposisi dan evaluasi hirarki. Dekomposisi terdiri atas tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan yakni identifikasi level dan elemen, definisi konsep dan formulasi pertanyaan, (Brojonegoro, 1992:102).

Dekomposisi merupakan bagian terpenting dalam aplikasi model AHP, karena dari sini validasi dan kemampuan model dapat diuji. Langkah pertama dalam dekomposisi adalah mengidentifikasi level dan elemen yang akan ditempatkan dalam satu level. Selanjutnya semua level dan elemen tersebut diidentifikasi dan dipakai dalam tahap formulasi pertanyaan, (Brojonegoro, 1992:119).

Jika terjadi kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, maka level dan konsep tadi harus direvisi dan dimodifikasi. Dekomposisi sebenarnya merupakan proses iterasi dimana konsep-konsep, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya dapat menentukan elemen dan level suatu hirarki. Apabila terjadi ketidakjelasan atau kesalahan dalam proses menjawab pertanyaan-pertanyaan dapat membuat para pengambil keputusan memilih kriteria atau alternatif yang salah, untuk itu, sebaiknya semua pertanyaan seharusnya dapat dijawab secara konsisten berdasarkan informasi yang tersedia.

Proses menyusun hirarki secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki yang biasa disebut dengan goal yakni masalah yang akan dicari pemecahannya lewat model AHP. Setelah itu menentukan kriteria yang diperlukan untuk mendukung tujuan keseluruhan. Terakhir adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah kriteria.

Banyaknya level dalam hirarki tidak ada batasnya. Jika dalam suatu hirarki tidak mampu membandingkan elemen-elemen dalam suatu level terhadap elemen tingkat yang lebih tinggi berikutnya, maka harus diupayakan satu tingkat antara yang berarti memecah elemen-elemen dari tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Dalam pembuatan hirarki untuk pemecahan konflik yang melibatkan banyak pelaku digunakan peralatan konsep perencanaan forward dan backward secara berulang. Level yang biasa dimasukkan dalam hirarki biasanya adalah kendala, pelaku, tujuan para pelaku, kebijakan dan hasil yang akan diharapkan.

4. Menyusun Hirarki

Setelah melakukan hierarki, proses selanjutnya adalah menimbang relatif pentingnya semua elemen dengan menggunakan skala perbandingan dengan angka 1-9. Berdasarkan penggunaan skala ini dan perbandingan kepentingan setiap elemen tersebut dinyatakan dalam matriks perbandingan berpasangan selanjutnya ditetapkan prioritasnya.

Dalam menimbang relatif pentingnya setiap elemen harus diterapkan prinsip konsistensi Logis : Jika emas 3 kali lipat mahalnya dibandingkan perak dan perak 3 kali lebih mahal dibandingkan tembaga, maka mahalnya emas adalah 9 kali lebih mahal dari tembaga. Prinsip konsistensi logis ini dikenal juga dengan *aksioma reciprocal*.

Pengisian persepsi *expert* dengan melakukan perbandingan antara elemenelemen dalam satu level dengan juga memperhatikan pengaruh

level di atasnya, karena otak manusia ada batasnya, maka skala rasio itu juga harus mempunyai batas tertentu yang tidak terlampaui besar tetapi cukup menampung persepsi manusia. Dalam model AHP digunakan batas 1 sampai 9 yang dianggap cukup mewakili persepsi manusia seperti tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 7. Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP

10	Definisi	Keterangan
1	<i>Equal Importance</i> (semua sama pentingnya)	Dua elemen menyumbang sama besar terhadap tujuan
3	<i>Moderate Importance of One Over Another</i> (Sedikit lebih penting)	Pengalaman dan penilaian agak menyukai sebuah elemen daripada yang lainnya
5	<i>Strong or Essential Importance</i> (Lebih penting)	Pengalaman dan penilaian kuat lebih menyukai sebuah elemen dari pada yang lainnya
7	<i>Very Strong or Demonstrated Importance</i> (Sangat lebih penting)	Sebuah elemen sangat kuat lebih disukai daripada yang lainnya: dominasinya kelihatan nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	<i>Extreme Importance</i> (Mutlak sangat penting)	Fakta sebuah elemen lebih disukai daripada yang lainnya berada pada kemungkinan yang tertinggi
2, 4, 6, 8	<i>Intermediate Values Reciprocals for Inverse Comparison</i>	Apabila kompromi diperlukan antara dua penilaian

Sumber: Saaty (2008:57)

Adanya suatu standar atau batasan tertentu dalam skala tersebut didasarkan beberapa alasan. *Pertama*, perbedaan hal-hal yang kualitatif akan mempunyai arti dan dapat dijamin keakuratannya apabila dibandingkan dalam besaran yang sama dan jelas. *Kedua*, adalah bahwa secara umum seseorang dapat menyatakan perbedaan hal-hal kualitatif dalam lain istilah yaitu, sama, lemah, kuat, sangat kuat dan absolut.

5. Menetapkan Prioritas

Sebenarnya dalam model AHP, penilaian/pemberian persepsi oleh satu orang saja sudah dapat dipakai dalam pengambilan keputusan apabila orang tersebut telah betul-betul memenuhi kriteria *expert* akan tetapi karena kurang jelasnya kriteria *expert* dan seringnya timbul keraguan akan kualitas seorang *expert*, maka model AHP biasanya

menggunakan penilaian lebih dari satu orang (persepsi kelompok) terutama untuk suatu permasalahan yang harus dipecahkan dari berbagai sudut pandang. Dalam hal pengisian persepsi kelompok expert ada dua cara yang umumnya dipakai yaitu pertama seluruh expert berkumpul di suatu tempat dan mereka mengeluarkan data persepsi untuk satu perbandingan dan yang kedua adalah dengan cara pengisian kuesioner. Cara kedua ini akan menghasilkan n persepsi ($n =$ jumlah responden/*expert*) untuk satu perbandingan seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Skala Banding Persepsi Secara Berpasangan dalam AHP

No	Aksioma	Keterangan
1	<i>Reciprocal Comparison</i>	Sipengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.
2	<i>Homogeneity</i>	Preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya
3	<i>Independence</i>	Preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif secara keseluruhan
4	<i>Expectations</i>	Struktur hirarki diasumsikan lengkap. Ekspetasi dan persepsi manusia lebih menonjol daripada rasionalitas

Sumber: Saaty (2008:61)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah, (Moleong, 2011:62).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sesuai yang dikembangkan oleh George R. Terry dalam Rahmad (2019:14-20), dengan indikator:
 - a. *Planning* (Perencanaan)
 - b. *Organizing* (Pengorganisasian)
 - c. *Actuating* (Pelaksanaan)
 - d. *Controlling* (Pengendalian)
2. Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dilihat dari:
 - a. Pendidikan, bidang pendidikan dilaksanakan dengan membuat sebuah program seperti:
 1. Peningkatan kualitas program tenaga pendidik, yang meliputi:
 - a. Optimalisasi kegiatan pelatihan tenaga pendidik
 - b. Pelaksanaan program secara berkelanjutan
 - c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program ke seluruh sekolah.
 2. Penyesuaian program dan pelaksanaan, yang meliputi:
 - a. Pemenuhan fasilitas belajar bagi siswa/peserta didik
 - b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik/guru
 - c. Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik.
 3. Pemerataan pendidikan, yang meliputi:
 - a. Menurunkan angka putus sekolah
 - b. Kemudahan masyarakat melakukan akses layanan pendidikan
 - c. Pemberian jaminan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
 - b. Kesehatan, bidang kesehatan dilaksanakan dengan membuat sebuah program seperti:
 1. Peningkatan fasilitas alat kesehatan, yang meliputi:
 - a. Pengadaan alat kesehatan yang modern
 - b. Menambah jumlah anggaran untuk membeli alat-alat kesehatan yang modern
 - c. Memudahkan tenaga medis melakukan diagnosa.

2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di poli, yang meliputi:
 - a. Menambah tenaga kesehatan spesialis
 - b. Menyediakan obat-obatan yang berkualitas
 - c. Memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan tepat.
 3. Meningkatkan ketepatan layanan kesehatan, yang meliputi::
 - a. Pegawai teliti yang cermat dan teliti
 - b. Ketepatan dalam memberikan layanan
 - c. Pegawai memiliki kemampuan atau kompetensi dalam memberikan layanan kesehatan.
 4. Penetapan biaya layanan, yang meliputi:
 - a. Biaya kesehatan terjangkau oleh masyarakat
 - b. Memberikan potongan biaya layanan kesehatan
 - c. Memberikan jaminan biaya kesehatan yang murah dan terjangkau.
 5. Meningkatkan kualitas kemudahan akses layanan kesehatan, yang meliputi:
 - a. Mempercepat proses layanan
 - b. Adanya keterbukaan atau transparansi
 - c. Meningkatkan responsifitas layanan kesehatan.
- c. Sosial ekonomi, bidang dilaksanakan dengan membuat sebuah program seperti:
1. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Memberikan tambahan modal melalui kredit lunak
 - c. Membantu masyarakat dalam memberikan akses layanan di perbankan.
 2. Peningkatan jumlah *home industry*, yang meliputi:
 - a. Melakukan pendampingan kepada pelaku home industry
 - b. Meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif
 - c. Membangun lembaga pelatihan bagi *home industry*.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), yang meliputi:
 - a. Melakukan penyerapan tenaga kerja lokal
 - b. Meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Permodelan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.

3.3 Narasumber/Informan

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber/informan adalah para pakar/pemerhati kebijakan daerah tertinggal yang akan dimintai opininya mengenai kebijakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat serta untuk penentuan bobot kriteria/subkriteria yang akan digunakan untuk menentukan kesiapan setiap strategi, dilihat dari kondisi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan peningkatan pembangunan ekonomi. Adapun narasumber yang dimaksud antara lain:

1. Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H Bupati Pesisir Barat;
2. Nazrul Arif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Ir. N. Lingga Kusuma, M.P Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
4. Drs. Zukri Amin, M.P Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Tedi Zadmiko, S.Km., M.M Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
6. Sudibyso, S.E Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agus Triyadi, S.IP., M.M Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat;
8. Drs. Gunawan, M.Si Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat;
9. Sukmawati, S.Sos Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
10. Edwin Kastolani Burtha, S.H., M.P Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari studi lapangan melalui penyebaran daftar pertanyaan/kuesioner dan wawancara langsung dari narasumber, diskusi, serta seminar-seminar. Informasi yang diperoleh akan diolah untuk menjadi objek analisa terutama dalam menginterpretasikan atau menjelaskan makna dari data-data yang diperoleh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisis sumber literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dalam hal ini tentang strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam konteks perbatasan yang dilihat dari pelayanan dasar mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Bentuknya dapat berupa buku teks, hasil penelitian, laporan kerja, aturan hukum, terbitan ilmiah seperti jurnal, artikel ilmiah dan sebagainya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Daftar pertanyaan/kuisisioner, yaitu pengumpulan data dan informasi terhadap narasumber yang dilakukan dengan lembar wawancara tertulis untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dari responden terkait objek penelitian;

2. Wawancara, merupakan teknik tanya jawab dengan pihak-pihak terkait penelitian guna menjangkau data yang tidak diperoleh dari daftar pertanyaan/kuesioner dan data sekunder yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian, yaitu para pakar kebijakan daerah tertinggal yang ada diperguruan tinggi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*), yaitu wawancara yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber/informan yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Selama melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat dan merekam apa yang dikemukakan oleh narasumber/informan;
3. Studi Lapangan (Observasi), merupakan suatu kegiatan untuk dapat memasuki wilayah penelitian dengan maksud agar dapat diperoleh data primer yang dapat dicermati dan dicatat langsung oleh peneliti. Langkah observasi dilakukan dengan mengikuti pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang terkait erat dengan pelaksanaan tarif listrik regional di Indonesia

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Setelah dilakukan pengumpulan data sekunder dan penyebaran kuesioner kepada responden maka hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau Proses Hirarki Analitik. Metoda ini akan membantu penulis untuk menentukan urutan prioritas strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan metoda *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penyebaran kuesioner kepada responden dimaksudkan untuk

mengetahui bobot setiap indikator dari variabel segmentasi tarif yang telah ditetapkan penulis untuk kemudian diolah menggunakan AHP.

Pengolahan data AHP pada penelitian ini menggunakan software ArcGIS 10.3. Tahap awal pada penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data yang mempengaruhi pelayanan pendidikan yaitu kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yaitu melihat kesejahteraan masyarakat. Tahap kedua adalah pengisian atribut dalam database dengan mengklasifikasi tiap parameter guna membedakan daerah-daerah didalam peta. Tahap selanjutnya adalah skoring merupakan perankingan data atribut pada peta. Kemudian pembobotan dengan perhitungan metode AHP yang menghasilkan bobot nilai sebagai penentu strategi kebijakan.

Tahap ketiga yaitu perkalian antara skoring tiap parameter dan bobot tiap parameter, yang menghasilkan suatu nilai penentu strategi masing-masing bidang. Selanjutnya adalah *overlay* peta yang bertujuan untuk penggabungan data atribut kriteria-kriteria, dan hasilnya berupa peta dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam percepatan daerah tertinggal.

IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

4.1 Sejarah Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Induk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Pada dasarnya pembentukan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperhatikan aspirasi masyarakat Pesisir Barat yang dituangkan dalam beberapa surat regulasi antara lain:

1. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat Nomor : 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 15/DPRD-LB/Kep,D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;

4. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/KPTS/01/2010, tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
5. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/198/ KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
6. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/199/KPTS/01/2010 tanggal, 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
7. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/BaKPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 29 Tahun 2007 tanggal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
9. Keputusan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang persetujuan pembentukan dan pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang persetujuan Bantuan Dana dan Pindahan personil Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat dan;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

4.2 Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat

Letak Kabupaten Pesisir Barat terletak pada koordinat : 4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104° , 50', 0" Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas + 2.809,71 km² atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini sektor di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis, berbatasan langsung dengan 2 (dua) Provinsi dan 1 (dua) Kabupaten, adapun data selengkapnya sebagai berikut yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tugu Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Simagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Nanningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni: Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut), Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut), dan Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai

dengan 2.000 meter dari permukaan laut). Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar \pm 160.868 jiwa. Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bangkunt merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 943,70 km² atau 32,69 % dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Krui Selatan dengan luas wilayah 36,25 km² atau 1,26% dari luas total wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Lebih jelasnya untuk mengetahui kecamatan-kecamatan dan jumlah kelurahan/ pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Daftar Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan/Desa		Luas Wilayah Administrasi	
		Kelurahan	Desa/ Pekon	(Km)	(%) thd Total
1	Bangkunt	-	14	943,70	33,59
2	Ngaras	-	9	215,03	7,45
3	Ngambur	-	9	327,17	11,33
4	Pesisir Selatan	-	15	409,17	14,17
5	Krui Selatan	-	10	36,25	1,26
6	Pesisir Tengah	2	6	120,64	4,18
7	Way Krui	-	10	40,92	1,42
8	Karya Penggawa	-	12	211,11	7,26
9	Pesisir Utara	-	12	84,27	2,92
10	Lemong	-	13	454,97	15,65
11	Pulau Pisang	-	6	64,00	2,20
Jumlah Total		2	116	2.907,23	100

Sumber: Dokumentasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2021

Berikut ini adalah gambaran umum Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari gambar peta berikut ini:



Gambar 9. Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Barat

4.3 Keadaan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat memiliki jumlah penduduk ± 160.868 jiwa dengan kepadatan rata-rata penduduk ± 55.33 jiwa/km². Data secara umum terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang tersebar di 11 Kecamatan, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/ Km2)
1	Bangkunat	943,70	26.087	27,64
2	Ngaras	215,03	9.491	44,13
3	Ngambur	327,17	21.361	65,29
4	Pesisir Selatan	409,17	26.192	64,01
5	Krui Selatan	36,25	10.381	286,37
6	Pesisir Tengah	120,64	19.926	165,16
7	Way Krui	40,92	9.063	221,48
8	Karya Penggawa	211,11	15.915	75,39
9	Pesisir Utara	84,27	8.479	100,61
10	Lemong	454,97	12.425	27,30
11	Pulau Pisang	64,00	1.548	24,18
Total		2.907,23	160.868	55,33

Sumber: Dokumentasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2021

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diberikan simpulan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat terkait dengan pelaksanaan program pelayanan dasar mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan peningkatan pembangunan sosial ekonomi, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan daerah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, diantaranya:
 - a. Pelayanan kesehatan
 1. *Planning*, perencanaan program layanan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbang tingkat pekon, kecamatan dan kabupaten
 2. *Organizing*, pengorganisasi pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pembuatan *master plan* Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat 2019-2025, untuk mencapai lima target/tujuan utama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup
 3. *Actuating*, pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan melalui kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan

kesehatan (rehabilitatif) yang di selenggarakan secara berkesinambungan oleh Dinas kesehatan

4. *Controlling*, pengendalian layanan kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan DPRD dan Inspektorat.

b. Pelayanan Pendidikan

1. *Planning*, perencanaan layanan pendidikan dilaksanakan dengan penambahan atau pemerataan pendidikan, memproyeksikan penambahan jumlah tenaga pendidik serta mempercepat perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan
2. *Organizing*, pengorganisasian di bidang pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan cara melakukan pembagian tugas dan kewenangan di masing-masing unit kerja
3. *Actuating*, pelaksanaan program percepatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan cara perbaikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah baik fisik maupun non fisik
4. *Controlling*, pelaksanaan *controlling* atau pengendalian untuk layanan pendidikan dilaksanakan oleh kepala daerah dan dilakukan secara internal dengan cara terjun langsung ke lembaga-lembaga pendidikan untuk melihat perkembangan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

c. Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi

1. *Planning*, perencanaan peningkatan pembangunan sosial ekonomi dilakukan dengan cara melibatkan berbagai stakeholder untuk menyusun program fisik dan non fisik
2. *Organizing*, pengorganisasian dalam peningkatan pembangunan sosial ekonomi dilaksanakan dengan cara melakukan sinergisitas antara institusi daerah dengan berbagai lembaga pemberdayaan tingkat Pekon atau UPK untuk memaksimalkan program peningkatan pembangunan sosial ekonomi

3. *Actuating*, program peningkatan sosial ekonomi dilaksanakan melalui penyedia sarana dan prasarana sampai dengan aksesibilitas hal itu dikarenakan banyak daerah yang kesulitan mengembangkan atau meningkatkan perekonomian
 4. *Controlling*, pelaksanaan controlling atau pengendalian dilaksanakan dengan melakukan evaluasi program pembangunan peningkatan sosial ekonomi setiap tiga bulan sekali untuk melihat pencapaian program dan masalah dalam pelaksanaan program
2. Hasil analisis Perhitungan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) menunjukkan bahwa:
- a. Pelayanan kesehatan memiliki 5 (lima) prioritas layanan dari ke-5 (lima) prioritas tersebut urutan prioritas layanan kesehatan yang terbaik adalah tingkat kemudahan dengan persentase sebesar 0.399, diikuti oleh prioritas layanan bagian poli sebesar 0.281, ketepatan layanan sebesar 0.183, biaya layanan sebesar 0.095 dan terakhir adalah fasilitas kesehatan sebesar 0.049 yang artinya kriteria yang paling berpengaruh atau menjadi prioritas dalam layanan kesehatan adalah tingkat kemudahan layanan yang diberikan oleh pegawai di layanan kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dengan total persentase sebesar 39.2%.
 - b. Pelayanan pendidikan memiliki 3 (tiga) prioritas dari ke-3 (tiga) prioritas tersebut urutan prioritas layanan pendidikan yang terbaik adalah pemerataan pendidikan memiliki nilai bobot sebesar 0.528, program berkualitas dengan bobot nilai 0.333 serta kesesuaian program dan pelaksanaan memiliki bobot nilai sebesar 0.140, yang artinya kriteria yang paling berpengaruh atau menjadi prioritas utama dalam layanan pendidikan adalah pemerataan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan total persentase sebesar 45.7%.

- c. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi memiliki 3 (tiga) kriteria dari ke-3 (tiga) kriteria tersebut urutan prioritas peningkatan pembangunan sosial ekonomi yang terbaik adalah pemanfaatan SDA memiliki nilai bobot sebesar 0.659, program pemberdayaan masyarakat dengan bobot nilai 0.263 serta meningkatkan jumlah *home industry* memiliki bobot nilai sebesar 0.097 yang artinya kriteria yang paling berpengaruh atau menjadi prioritas utama dalam peningkatan pembangunan sosial ekonomi adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan total persentase sebesar 63.6%.
3. Skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan daerah tertinggal adalah aspek pembangunan sosial ekonomi, aspek pembangunan sosial ekonomi memiliki peran yang besar dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat selaku daerah tertinggal, besarnya skala prioritas aspek pembangunan sosial ekonomi dilihat dari seluruh jawaban responden yang berjumlah 11 orang *expert*, dari seluruh jawaban responden aspek pembangunan sosial ekonomi memiliki bobot skor sebesar 0.705 atau 70.5%, diikuti oleh aspek layanan kesehatan sebesar 0.211 atau 21.1% serta aspek layanan pendidikan sebesar 0.084 atau 8.4%
4. Permodelan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat yang tepat adalah pada aspek pelayanan kesehatan, dimana masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat lebih menginginkan aspek pelayanan kesehatan untuk dijadikan prioritas utama dibandingkan pembangunan sosial ekonomi ataupun pelayanan pendidikan. Hal itu terlihat dari nilai persentase aspek pelayanan kesehatan memiliki persentase sebesar 62.4%, kemudian aspek pembangunan peningkatan sosial ekonomi sebesar 33.6% dan aspek pelayanan pendidikan sebesar 4.0%.

Besarnya keinginan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan dikarenakan pelayanan kesehatan di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan kurang memadai, mulai dari rumah sakit umum yang masih bertipe D, kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana, tenaga medis yang kurang memadai, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) pada waktu melahirkan dan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di atas maka dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan
 - a. Pemerintah Kabupaten Pesisir barat hendaknya melakukan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan pelayanan di Puskesmas dengan pola pelayanan prima minimal sejajar dengan pelayanan kesehatan di daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Pemberian insentif khusus melalui kegiatan yang dimasukkan ke dalam tugas pembantuan khusus tanpa memandang status dan asal usul kepegawaian;
 - c. Perlu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang ada di daerah tertinggal, pelatihan dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang suah maju yang memiliki kualitas yang lebih baik serta pemenuhan ketersediaan transportasi untuk rujukan sesuai topografi yaitu penyediaan sepeda motor jenis trail, kendaraan roda empat (mobil) *double gardan* dan lain sebagainya.

2. Pelayanan Pendidikan

Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir barat hendaknya terus melakukan upaya mempercepat peningkatan mutu atau kualitas layanan pendidikan di daerah-daerah tertinggal melalui:

- a. Mempercepat aksesibilitas menuju tempat pendidikan dengan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan menuju lembaga-lembaga pendidikan hal itu dikarenakan selama ini masih banyak siswa maupun guru yang kesulitan dalam menjangkau tempat belajar karena akses jalan yang kurang memadai;
- b. Penambahan tenaga pengajar (guru), penambahan tenaga pengajar sangat penting untuk memaksimalkan pembelajaran dan peningkatan kompetensi lulusan karena selama ini rasio guru dan peserta didik jauh atau tidak seimbang;
- c. Masyarakat hendaknya memberikan dukungan atas pelaksanaan pendidikan di daerah tertinggal, dukungan masyarakat yang dibutuhkan dalam aspek ini diantaranya juga adalah dukungan moral terhadap para pengajar. Namun, kadang tidak semua masyarakat daerah terpencil menyadari pentingnya pendidikan sehingga dukungan tersebut tidak bisa didapatkan.

3. Pembangunan Sosial Ekonomi

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat hendaknya memberikan dukungan secara maksimal kepada pelaku industri kreatif atau *home industry* dengan cara memberikan bantuan modal, peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana untuk kegiatan produksi usaha industri kreatif dan pengembangan kelembagaan (pemerintah atau swasta) sehingga pembangunan industri kreatif dapat dilaksanakan lebih terarah;
- b. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk tetap berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Langkah yang dapat ditempuh untuk merangsang iklim investasi yang baik

yaitu dengan perbaikan sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah dengan tidak mengabaikan kehati-hatian. Sehingga dengan pertumbuhan investasi yang baik juga akan memberikan dampak positif untuk Kabupaten Pesisir Barat seperti pengembangan sektor usaha baru, memperluas pasar, peningkatan daya saing, pengembangan teknologi baru, penyerapan lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi;

- c. Peningkatan aksesibilitas daerah dengan pembangunan infrastruktur dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, percepatan pembangunan dan peningkatan efektivitas pembangunan antar kawasan, sehingga target peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.
 - d. Perlu adanya perluasan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi di akses informasi yang lebih luas di Kabupaten Pesisir Barat yang nantinya akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Dengan perluasan jaringan telekomunikasi masyarakat di daerah tertinggal dapat mengakses dan melakukan pertukaran informasi yang berguna untuk aktivitas sehari-hari, masyarakat dapat mengakses kejadian terkini di daerahnya, akses informasi perubahan harga komoditas, akses informasi kebijakan terbaru dari instansi terkait, pemasaran produk lokal berbasis *online shop*, dan akses informasi lainnya yang dapat berguna untuk pembangunan daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hendanya lebih memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit sampai dengan puskesmas dan jaringannya di daerah perbatasan. Pemberian insentif khusus melalui kegiatan yang dimasukkan ke dalam tugas pembantuan khusus tanpa memandang status dan asal usul kepegawaian. Melaksanakan pertukaran petugas baik tingkat rumah sakit maupun puskesmas terdekat secara berkala. Di samping itu perlu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di daerah terpencil melalui kegiatan pelatihan untuk tenaga kesehatan serta

pemenuhan ketersediaan transportasi untuk rujukan di daerah tertinggal sesuai topografi yaitu penyediaan sepeda motor jenis trail, kendaraan roda empat (mobil) dobel garden serta kapal atau perahu jenis tertentu dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar. A. 2015. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Bogor: P4Wpres.
- Arikunto, Suharsini. 2011. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Aneka Kraya
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 2019. *Pesisir Barat dalam Angka*, Pesisir Barat.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Tata cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal*. Jakarta: Bappenas.
- Balilatfo Kemendesa. 2019. *Pelayanan Dasar Publik Daerah Tertinggal*, Jakarta.
- Brojonegoro PS, Bambang. 1992. *AHP (Analytical Hierarchy Process)*. Pusat antar university – studi ekonomi universitas Indonesia
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Indeks Daerah Membangun 2016*, Jakarta.
- Maddy, Khairul. 2009. *Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima*, Jakarta ; Chama Digit
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Moenir, H.AS. 2015, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mulyana, D. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Rachmat. 2019. *Manjemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia

- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Saaty, Thomas L. 2008. *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Pers.
- Salusu. J. 2016. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syahza, Almasdi dan Suarman. 2018. *Kajian Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Kementerian Negara PPN.
- Wanggai, V.V. 2014. *Rencana Kerja Sub-Direkorat Kawasan Tertinggal*. Jakarta: Bappenas

Jurnal

- Mita Yesyca. 2018. Percepatan Pembangunan di Empat Daerah Tertinggal di Jawa Timur: Perspektif Feminis. *Jurnal Inada Vol.1 No.1, Juni 2018*, 26-54
- Sari dan Sarah Meirina. 2018. Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 16- 28.
- Tantowi, Rahmat. 2019. *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah)*, *Jurnal Samudra Ekonomika*, VOL. 3, No.2
- Zainal Abidin. 2019. Kebijakan Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal: dari Jalan Kaki Hingga Mesin Transportasi. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 Tahun 2019*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional

Dokumentasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021.